



Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

Siti Maisyaroh¹, Muhammad Taufiq Hidayat²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1,2}

Received: 06 Februari 2026
Revised: 16 Februari 2026
Accepted: 28 Februari 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei, melibatkan 85 responden aparat desa yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa ($t = 2,275$, sig. 0,026), transparansi ($t = 3,791$, sig. 0,000), dan aksesibilitas laporan keuangan ($t = 2,297$, sig. 0,024) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan ($F = 28,999$, sig. 0,000) dengan $R^2 = 0,518$. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi aparat desa, transparansi informasi keuangan, dan aksesibilitas laporan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Kata Kunci: Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

(*) Corresponding Author:

sitimaisyaroh05906@gmail.com¹, taufikhidayat@untag-sby.ac.id²

How to Cite: Maisyaroh, S., & Hidayat, M. (2026). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.D), 132-143. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12772>.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan. Namun, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya kompetensi aparatur desa, rendahnya transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan yang terbatas. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kompetensi adalah kepribadian dan kecakapan individu yang terampil, dan pengetahuan yang menunjukkan kinerja seseorang. Kompetensi diukur dan dievaluasi sehingga kualitas kinerja seseorang dapat meningkat (Diatmika dan Rahayu 2020). Kompetensi yang dimiliki seseorang harus memiliki penerahuan, karakteristik, dan keterampilan untuk menunjang kinerja dalam menyajikan laporan keuangan yang baik (Aprisyah dan Yuliaty 2021). Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi pribadi untuk melakukan semua pekerjaan, dimana kompetensi dipengaruhi oleh dua dimensi, fisik dan intelektual. Kompetensi terbagi menjadi tiga bidang, yaitu antara lain: pengetahuan (knowledge), sikap atau tingkah laku (attitude) yang meliputi: etis, emosional dan spiritual kecerdasan, dan keterampilan (skill) baik fisik maupun teknis (Indriasih, Fajri dan Febriana

2022).

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merujuk pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi mengenai bagaimana dana desa digunakan, dianggarkan, dan dikelola. Hal ini melibatkan publikasi informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat umum, termasuk warga desa, media, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berperan penting dalam mempengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah desa. Dengan membuka akses informasi kepada publik, pemerintah desa diharapkan akan lebih bertanggung jawab, berintegritas, dan berfokus pada kepentingan masyarakat dalam mengelola dana desa dengan baik (Gaffar dan Gaffar 2024).

Aksesibilitas adalah bagian dari dasar-dasar tata pemerintahan yang bagus, sebab upaya guna mencapai tata pemerintahan yang bagus yaitu aksesibilitas laporan keuangan yang bagus pula dan sesuai norma yang berlaku. Aksesibilitas pada laporan keuangan memiliki arti dalam memberi akses kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan guna mendapatkan laporan keuangan dengan biaya murah dan mudah (Febriana, 2021).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari peyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo 2021).

Pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menghadapi tantangan serius yang berdampak pada akuntabilitas, di antaranya minimnya kompetensi aparatur desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes dan menyusun APBDes sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, rendahnya transparansi karena laporan keuangan jarang dipublikasikan secara rutin di papan informasi atau platform digital sebagaimana diatur dalam Pasal 53A UU No. 3 Tahun 2024, serta terbatasnya aksesibilitas laporan keuangan akibat format yang rumit dan kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan masyarakat sulit memahami dan mengawasi penggunaan dana, sehingga memicu kecurigaan penyalahgunaan, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pencairan dana desa periode berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem pengelolaan informasi keuangan yang diterapkan pada organisasi atau lembaga publik, yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Akuntansi sektor publik ini mencakup penyusunan laporan keuangan untuk entitas pemerintahan, lembaga nirlaba, dan badan-badan sektor publik lainnya (Mardiasmo 2021).

Proses akuntansi sektor publik melibatkan pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis data, serta pembuatan laporan keuangan bagi entitas bisnis, badan, atau organisasi, baik swasta maupun publik. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya (Qulub dan Hidayat 2023).

Kompetensi Pemerintah Desa

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan, pada konteks manajemen sumber daya manusia istilah kompetensi mengacu pada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan kompetensi merupakan kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompetensi perangkat desa adalah kemampuan perangkat desa baik keterampilan maupun keilmuan. Hal tersebut menjadi konsekuensi yang penting agar dana yang dikelola dapat berkembang dalam berbagai aspek. Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan aparatur desa wajib untuk ada ilmu yang mumpuni khususnya yang memiliki kaitan dengan pekerjaannya dan menjadi sebuah tanggung jawab (Aisy dan Hidayat 2023).

Transparansi

Pasal 53A Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan transparansi berarti keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui secara terbuka mengenai laporan atau informasi keuangan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat dianjurkan oleh pemerintah (Panjaitan, Simanjuntak, Yosephine, Sembiring, & Siahaan, 2022).

Pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi dalam aktivitas urusan publik salah satunya di bidang administrasi keuangan dapat memudahkan pengawasan terhadap pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemerintahan. Transparansi dapat mendorong kinerja karyawan pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam mengambil kebijakan pemerintah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah (Jatmiko 2020).

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyediakan suatu kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan atau pihak stakeholderguna untuk mengetahui dan memperoleh sebuah informasi laporan keuangan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan.

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui penyebaran informasi laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak pengguna yang berkepentingan (Puspa & Prasetyo , 2020).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan merupakan istilah yang terkait dalam tata kelola organisasi yang menggambarkan sebuah bentuk pertanggungjawaban kepentingan yang wajib untuk diberitahukan dan dilaporkan atas kinerja terhadap tiap-tiap tindakan yang menyangkut hubungan saat ini ataupun di masa depan baik antar individu dan kelompok untuk dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan sanksi jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang (Suryani dan Hidayat 2023).

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada peraturan ini adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan peraturan ini akuntabel pengelolaan desa merupakan asas yang harus dipatuhi oleh pemerintahan desa.

Kerangka Konseptual



Gambar Kerangka Konseptual

Sumber: Dikaji oleh penulis, 2025

Hipotesis

Berdasarkan penelitian ini menghasilkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Waru Kab. Sidoarjo

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Waru Kab. Sidoarjo

H3 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Waru Kab. Sidoarjo

H4 : Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Waru Kab. Sidoarjo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi terdiri dari aparat desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan sampel sebanyak 85 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan BPD yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa di Kec. Waru Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 17 desa

serta sampel yang berjumlah 85 responden yang terkumpul.

HASIL & PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pemerintah desa (X1), transparansi (X2), dan aksesibilitas laporan keuangan (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 85 responden, yang terdiri dari perangkat desa di balai desa yang menerima alokasi dana desa. Kuesioner menggunakan skala Likert (1-5) untuk mengukur empat indikator masing-masing variabel. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan regresi linier berganda, dengan hasil pengujian yang meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi). Model regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Di mana:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1 : Kompetensi Pemerintah Desa

X2 : Transparansi

X3 : Aksesibilitas Laporan Keuangan

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

ϵ : Error tern

Uji Validitas

Hasil uji validitas menggunakan IBM SPSS Statistic 25 untuk variabel Komoetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kompetensi Pemerintah Desa	X1.1	0,806	0,213	Valid
	X1.2	0,886	0,213	Valid
	X1.3	0,815	0,213	Valid
	X1.4	0,701	0,213	Valid
Transparansi	X2.1	0.694	0,213	Valid
	X2.2	0.661	0,213	Valid
	X2.3	0.738	0,213	Valid
	X2.4	0.717	0,213	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	X3.1	0.866	0,213	Valid
	X3.2	0.693	0,213	Valid
	X3.3	0.809	0,213	Valid
	X3.4	0.646	0,213	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0.848	0,213	Valid
	Y2	0.848	0,213	Valid
	Y3	0.784	0,213	Valid

	Y4	0.846	0,213	Valid
--	----	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil analisis uji validitas menunjukkan bahwa instrumen variabel Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang masing-masing terdiri dari 4 pernyataan dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ 0,213 r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang berkaitan dengan variabel-variabel yang di uji. Teknik yang digunakan pada uji reliabilitas ini yakni *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0.60, maka variabel dinyatakan reliabel.

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa (X1)	0,817	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,625	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,715	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,847	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Semua item kuesioner untuk variabel X1, X2, X3, dan Y memiliki korelasi Pearson signifikan ($p <$ 0,05). Nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel adalah: X1 (0,817), X2 (0,625), X3 (0,751), dan Y (0,847), menunjukkan reliabilitas yang memadai.

Analisis Statistik Dekriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Pemerintah Desa (X1)	85	8,00	20,00	15,4118	2,62449
Transparansi (X2)	85	13,00	20,00	16,7176	1,94331
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	85	10,00	20,00	15,6824	2,46022
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	85	12,00	20,00	17,5765	2,05505
Valid N (listwise)	85				

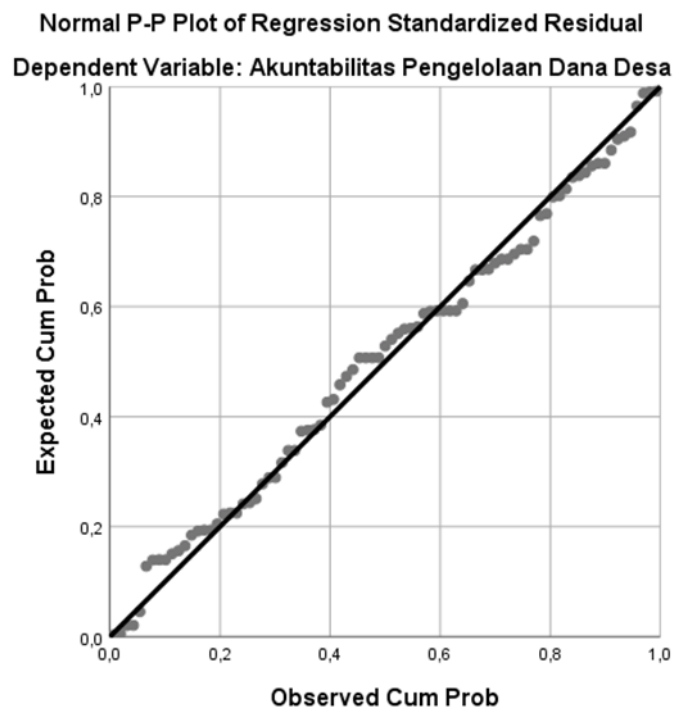
Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata skor untuk kompetensi pemerintah desa adalah 15,41 dengan standar deviasi 2,62, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki

persepsi yang cukup baik terhadap kompetensi aparat desa. Transparansi memiliki rata-rata tertinggi (16,72) dengan standar deviasi 1,94, mengindikasikan tingkat keterbukaan informasi yang relatif konsisten. Aksesibilitas laporan keuangan memiliki rata-rata 15,68 (standar deviasi 2,46), menunjukkan bahwa laporan keuangan cukup mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki rata-rata tertinggi (17,58) dengan standar deviasi 2,06, mencerminkan tingkat akuntabilitas yang baik di kalangan aparat desa di Kecamatan Waru.

Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan metode P-Plot Normality dan taraf signifikannya 0,05. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal apabila sebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut (Qulub & Hidayat, 2023).



Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik P-P Plot mengikuti garis diagonal dengan baik, yang mengindikasikan bahwa residual model terdistribusi normal. Hal ini menegaskan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi normalitas untuk analisis regresi, sehingga hasil estimasi model dapat dianggap valid.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apabila model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen ini saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Qulub & Hidayat, 2023).

Syaratnya Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari > 0.1, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

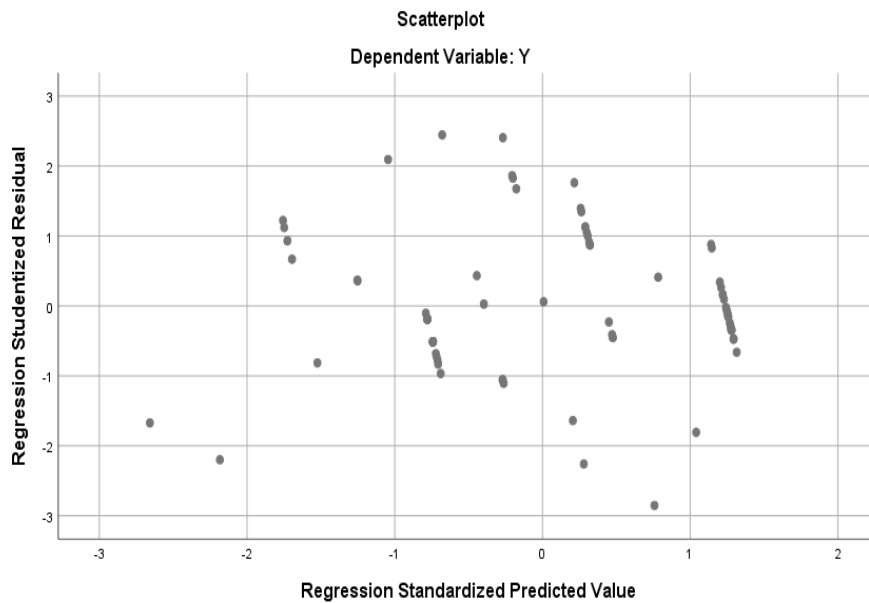
		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	4,646	1,413		3,289	,001	
	Kompetensi Pemerintah Desa (X1)	,158	,069	,201	2,275	,026	,761 1,314
	Transparansi (X2)	,443	,117	,419	3,791	,000	,487 2,051
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	,197	,086	,236	2,297	,024	,563 1,778

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Multikolinieritas diuji menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji menunjukkan nilai VIF untuk kompetensi pemerintah desa (X1) sebesar 1,314, transparansi (X2) sebesar 2,051, dan aksesibilitas laporan keuangan (X3) sebesar 1,778. Karena semua nilai VIF berada di bawah ambang batas 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model ini tidak saling berkorelasi secara berlebihan, sehingga estimasi koefisien regresi dapat dipercaya.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa variansi residual konstan di seluruh tingkat variabel independen. Keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi model menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati scatterplot residual terhadap nilai prediksi. Hasil scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, seperti corong atau kurva. Hal ini mengindikasikan bahwa data bebas dari heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan hasil analisis dapat dianggap konsisten.

Uji Hipotesis

1. Uji t

		Coefficients ^a				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,646	1,413		3,289	,001
	Kompetensi Pemerintah Desa (X1)	,158	,069	,201	2,275	,026
	Transparansi (X2)	,443	,117	,419	3,791	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	,197	,086	,236	2,297	,024

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

- Kompetensi Pemerintah Desa (X1): Nilai $t = 2,275$ dengan signifikansi $0,026 (< 0,05)$ menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Koefisien regresi ($B = 0,158$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada kompetensi pemerintah desa akan meningkatkan akuntabilitas sebesar $0,158$ unit.
- Transparansi (X2): Nilai $t = 3,791$ dengan signifikansi $0,000 (< 0,05)$ menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Koefisien regresi ($B = 0,443$) mengindikasikan bahwa transparansi memiliki kontribusi terbesar di antara variabel independen lainnya.
- Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3): Nilai $t = 2,297$ dengan signifikansi $0,024 (< 0,05)$ menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Koefisien regresi ($B = 0,197$) menunjukkan bahwapeningkatan aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas sebesar $0,197$ unit.

2. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	183,710	3	61,237	28,999	,000 ^b
Residual	171,043	81	2,112		
Total	354,753	84			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3), Kompetensi Pemerintah Desa (X1), Transparansi (X2)

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas, uji F menunjukkan bahwa nilai $F = 28,999$ dengan signifikansi $0,000 (< 0,05)$ menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 ^a	,518	,500	1,453

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3), Kompetensi Pemerintah Desa (X1), Transparansi (X2)

Sumber: Hasil Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas, uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R^2 = 0,518$ menunjukkan bahwa 51,8% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi pemerintah desa yang memadai memungkinkan aparat desa untuk mengelola dana desa secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi, yang memiliki pengaruh terbesar dalam penelitian ini, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan. Aksesibilitas laporan keuangan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun ketiga variabel memiliki pengaruh signifikan, masih ada 48,2% variasi akuntabilitas yang dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, atau penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang akuntabel memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada kompetensi, transparansi, dan aksesibilitas, tetapi juga pada faktor pendukung lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Hasil analisis menunjukkan nilai t sebesar 2,275 (sig. 0,026) untuk kompetensi pemerintah desa, 3,791 (sig. 0,000) untuk transparansi, dan 2,297 (sig. 0,024) untuk aksesibilitas laporan keuangan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai F sebesar 28,999 (sig. 0,000) dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,518, yang berarti 51,8% variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki beberapa langkah strategis. Peningkatan kompetensi aparat desa dapat dilakukan melalui pelatihan yang terarah, sementara transparansi dapat ditingkatkan dengan publikasi laporan keuangan secara rutin. Selain itu, optimalisasi aksesibilitas laporan keuangan dapat dicapai dengan menyederhanakan format laporan dan memanfaatkan media digital untuk sosialisasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, A. R., & Hidayat, M. T. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Sistem Kueangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Di Kec. Waru Kab. Sidoarjo. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
- Bpk, J. (N.D.). *Database Peraturan* . Retrieved Oktober 2024, From Jdih Bpk Ri: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582>
- Diatmika, I. G., & Rahayu, S. (2020). Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Kabuten Buleleng. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*.
- Febriana, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantir Pemerintah Desa Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang).
- Gaffar, & Gaffar, M. I. (2024). Transparansi Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Article*.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Panjaitan, R., Simanjuntak, A., Yosephine, Sembiring, & Siahaan, B. S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Dana Desa . *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* .
<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Qulub, L., & Hidayat, M. T. (2023). The Influence Of Village Apparatus Competency, Village Treasurer's Tax Compliance, And Community Participation On Accountability Of Village Fund Management In Tambak District, Gresik Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*.
- Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Dengan Moderari Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Indonesia*. <https://doi.org/10.53363/buss.v3i1.121>
- Undang-Undang, N. 3. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.
- Undang-Undang, N. 6. (N.D.). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. Retrieved From Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.